

ALASAN DI BALIK RESENTRALISASI KEHUTANAN

RONY DWI HARTANTO



**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Alasan Di Balik Rersentralisasi Kehutanan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Jakarta, Januari 2025

Rony Dwi Hartanto
E14180097

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ABSTRAK

RONY DWI HARTANTO. Alasan Di Balik Rersentralisasi Kehutanan. Dibimbing oleh PROF. DR. IR. SUDARSONO SOEDOMO, M.S., MPPA.

Penarikan urusan pemerintahan terjadi pada UU No. 23 Tahun 2014 (resentralisasi). UU No 23 Tahun 2014 menyebabkan Dinas Kehutanan kabupaten/kota dihapus. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tidak adanya Dinas Kehutanan di kabupaten/kota dan mengetahui apakah kabupaten/kota dapat membentuk Dinas Kehutanan sendiri untuk membina masyarakat yang memiliki hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi literasi dan mewawancarai 5 orang pihak Dinas Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan kabupaten/kota dihapus karena kurangnya anggaran pemerintah pusat, perlunya memperpendek koordinasi pusat-daerah, dan penyalahgunaan kewenangan oleh bupati/walikota. UU No 23 Tahun 2014 tidak melarang pembentukan Dinas Kehutanan kabupaten/kota. Namun, Pemerintah kabupaten/kota juga tidak dapat membentuk Dinas Kehutanan karena tidak memiliki kewenangan sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih mendalam mengenai UU No 23 Tahun 2014.

Kata kunci: Dinas Kehutanan, Kehutananan, Resentralisasi,

ABSTRACT

RONY DWI HARTANTO. The Reasons Behind Recentralization of Forestry. Supervised by PROF. DR. IR. SUDARSONO SOEDOMO, M.S., MPPA.

The withdrawal of governmental affairs occurred with Law No. 23 of 2014 (recentralization). Law No. 23 of 2014 caused the Forestry Offices at the regency/city level to be abolished. This study aims to identify the factors influencing the absence of Forestry Offices at the regency/city level and to determine whether the regencies/cities can establish their own Forestry Offices to assist communities with private forests. The method used is a qualitative descriptive method with literature study and interviews with five Forestry Office officials. The study results indicate that the Forestry Office at the regency/city level were abolished due to insufficient funding from the central government, the need to streamline coordination between central and regional governments, and the misuse of authority by regents/mayors. Law No. 23 of 2014 does not prohibit the establishment of Forestry Offices at the regency/city level. However, regency/city governments are also unable to establish such offices because they lack any authority in this matter. Therefore, a deeper review of Law No. 23 of 2014 is needed.

Keywords: Forestry, Forestry Service, Recentralization



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

ALASAN DI BALIK RESENTRALISASI KEHUTANAN

RONY DWI HARTANTO

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Manajemen Hutan

**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:

1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS
2. Priyanto, S.Hut., MSi

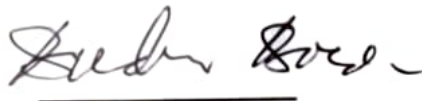
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Alasan Di Balik Resentralisasi
Kehutanan Nama : Rony Dwi Hartanto
NIM : E14180097

Disetujui oleh

Pembimbing:
Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S., MPPA



Diketahui oleh

Ketua Departemen Manajemen Hutan:
Dr. Ir. Soni Trison, S.Hut, M.Si., IPU
NIP. 197711232007011002



Tanggal Ujian:
27 Desember 2024

Tanggal Lulus:
07 JAN 2025



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dengan judul penelitian “Alasan Di Balik Resentralisasi Kehutanan”. Penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terjadi tanpa dukungan, bantuan, arahan, dan nasihat dari berbagai pihak sepanjang proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S., MPPA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
2. Bapak Firman Gumilar, selaku pegawai Dinas Kehutanan Jawa Barat (Dishut Jabar) dan bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
3. Bapak Andi Sukman, selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banten (DLHK Banten) dan bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
4. Bapak Heri Rahmat, selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banten (DLHK Banten) dan bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
5. Bapak Mohammad Haryadi, selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banten (DLHK Banten) dan bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
6. Bapak Suparyana, selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banten (DLHK Banten) dan bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
7. Orang tua dan saudara, atas doa, kepercayaan, dan dukungannya dalam bentuk moral maupun finansial kepada penulis. Tanpa dukungan mereka penulis mungkin tidak akan bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Keluarga besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta Departemen Manajemen Hutan (DMNH) Angkatan 55 atas ilmu dan kebersamaan yang telah diberikan.
9. Teman-teman seangkatan dan rumah yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan..

Jakarta, Januari 2025

Rony Dwi Hartanto



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Sentralisasi	3
2.2 Desentralisasi	3
2.3 Dinas Kehutanan	4
III. METODE	5
1.1 Waktu dan Tempat	5
1.2 Alat dan Bahan	5
1.3 Prosedur Pengumpulan Data	5
1.3.1. Identifikasi Kata Kunci	5
1.3.2. Pencarian Artikel Terkait Kata Kunci	5
1.3.3. Penyaringan Kelayakan Artikel Hasil Pencarian	5
1.3.4. Wawancara Semi-Terstruktur	6
1.4 Analisis Data	6
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1. Perkembangan Sentralisasi dan Desentralisasi Kehutanan Indonesia	9
4.2 Perbedaan kewenangan Dinas Kehutanan dalam sistem desentralisasi dan resentralisasi	11
4.3 Pandangan Dinas Kehutanan terhadap penghapusan Dinas Kehutanan kabupaten/kota	16
V. SIMPULAN DAN SARAN	19
5.1 Simpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	23
RIWAYAT HIDUP	25



DAFTAR TABEL

1	Daftar pertanyaan utama yang diajukan	6
2	Pasal terkait sentralisasi	9
3	Pasal terkait kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan pada UU No 22 Tahun 1999 dan UU No.41 Tahun 1999	10
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berdasarkan PP No 38 Tahun 2007	12
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014	14

DAFTAR GAMBAR

1	Wawancara dengan Bapak Firman Gumilar pegawai dishut	23
2	Wawancara dengan Bapak Andi Sukman Pegawai DLHK Banten	23
3	Wawancara dengan Bapak Heri Rahmat DLHK Banten	23
4	Wawancara dengan Bapak Haryadi DLHK Banten	24
5	Wawancara dengan Bapak Suparyana DLHK Banten	24